

MONEV PENINGKATAN INDEKS SPBE 2019

No	Indikator	Rekomendasi	Nilai Tingkat Kematangan	Tindak Lanjut	Target Waktu	OPD Terkait
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan dan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Membuat Kebijakan Tim Pengarah SPBE	2019	DKIS
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	Membuat Kebijakan Proses Bisnis Integrasi	2019	Bagian Organisasi
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk yang mencakup secara lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE.	1	Membuat Kebijakan Rencana Induk SPBE	2019	DKIS
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana induk SPBE, pengendalian rencana dan anggaran TIK yang terpadu di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan mendukung penerapan SPBE yang terpadu tidak hanya di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tetapi juga antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.	3	Membuat Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK	2019	Bappeda
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	2	Revisi Perwali eGov atau Arsitektur SPBE (Pusat Data)	2019	DKIS

6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3	Revisi Perwali eGov atau Arsitektur SPBE (Integrasi Sistem)	2019	DKIS
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi dengan layanan SPBE lain yang telah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3	Revisi Perwali eGov atau Arsitektur SPBE (Aplikasi Umum Berbagi Pakai)	2019	DKIS
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	2	Membuat Kebijakan Layanan Naskah Dinas	2019	Bag. Organisasi
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	Membuat Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian	2019	BKPSDM
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	Membuat Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	2019	Bappeda
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	Membuat Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan	2019	BPKAD

12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan layanan manajemen kinerja secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen kinerja secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.	3	Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja	2019	BKPSDM
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen pengadaan secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengadaan secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.	3	Revisi Perwali No 2 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengadaan (Integrasi dengan Layanan SPBE lainnya)	2019	Bag. Pengadaan Barang Jasa
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.	3	Revisi Perwali No 45 Tahun 2014 Tentang Pengaduan Publik (Integrasi dengan Layanan SPBE lainnya)	2019	DKIS
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	Membuat Kebijakan Layanan JDIH	2019	Bag, Hukum
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan WBS	3	Revisi Perwali No 45 Tahun 2014 Tentang Pengaduan Publik (Integrasi dengan Layanan SPBE lainnya).	2019	DKIS

		secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.		Atau membuat Kebijakan khusus WBS.		
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi pemerintah	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan publik secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan publik secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.	3	Setiap Layanan Publik dibuatkan Kebijakan (Integrasi dengan Layanan SPBE lainnya)	2019	Dinas Perijinan, Dinas Dukcapil, dll
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya ditetapkan, serta menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.	1	Membentuk Tim Pengarah SPBE	2019	DKIS
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.	3	Membuat Arsitektur SPBE (Proses Bisnis Integrasi)	2019	DKIS
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Rencana induk SPBE sebaiknya dilengkapi dengan mencakup visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.	2	Membuat Rencana Induk SPBE	2019	DKIS
21	Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi	Perencanaan dan penganggaran TIK sebaiknya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan secara terpadu sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengelola TIK, dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.	3	Anggaran Belanja TIK diukur, dipantau dan dievaluasi berkala	2019	Bappeda
22	Pengoperasian Pusat Data	Perencanaan kapasitas, pengendalian, dan pemantauan layanan dari satu atau beberapa pusat data (data center) sebaiknya dapat dilakukan secara berkala dan terpusat (manajemen tunggal).	3	Pengembangan Data Center	2019	DKIS
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya diterapkan secara menyeluruh berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.	2	Integrasi sesuai arsitektur dari Rencana Induk SPBE	2019	DKIS
24	Penggunaan Aplikasi	Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh	2	Aplikasi Umum sesuai	2019	DKIS

	Umum Berbagi Pakai	seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.		arsitektur dari Rencana Induk SPBE		
25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3	Integrasi Layanan Naskah Dinas dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	Bag. Organisasi
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan dan verifikasi terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.	1	Layanan Manajemen Kepegawaian ditingkatkan menjadi transaksi dua arah berbasis online dan terintegrasi dengan SPBE lainnya	2019	BKPSDM
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Layanan manajemen perencanaan kegiatan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.	4	Optimalisasi Layanan Manajemen Perencanaan dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	Bappeda
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Layanan manajemen penganggaran yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.	4	Optimalisasi Layanan Manajemen Penganggaran dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	Bappeda
29	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan manajemen keuangan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi	4	Optimalisasi Layanan Manajemen Keuangan dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	BPKAD

		Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.				
30	Layanan Manajemen Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3	Optimalisasi Layanan Manajemen Kinerja dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	BKPSDM
31	Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.	4	Optimalisasi Layanan Pengadaan dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	Bag. Pengadaan Barang & Jasa
32	Layanan Pengaduan Publik	Layanan pengaduan publik ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3	Optimalisasi Layanan Pengaduan Publik dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	DKIS
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.	2	Optimalisasi Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar proses layanan dari awal pengajuan hingga akhir berbasis online	2019	Bag. Hukum
34	Layanan Whistle Blowing System	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi	3	Optimalisasi Layanan Whistle Blowing System dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	DKIS

		proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.				
35	PRO DENPASAR	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).	1	Yang diinputkan sebaiknya Layanan Publik yang belum dinilai pada indikator sebelumnya	2019	DKIS
36	Bursa Kerja Online	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3	Optimalisasi Layanan Bursa Kerja dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	Dinas Tenaga Kerja
37	Perijinan Online	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3	Optimalisasi Layanan Perijinan dengan SPBE lainnya sesuai arsitektur SPBE	2019	Dinas Perijinan